

**LAPORAN AKHIR PENELITIAN
UNIVERSITAS BAKRIE
TAHUN 2022**

Judul Penelitian:

**Praktik Akuntansi Keberlanjutan dalam Ketidakpastian Usaha dan
Ketidakpastian Lingkungan Setelah Tahun 2022**

Bidang Penelitian
Akuntansi/Keuangan

oleh

RENE JOHANNES



**Universitas Bakrie
Kampus Kuningan Kawasan Epicentrum
Jl. HR Rasuna Said Kav. C-22, Jakarta, 12920**

**LEMBAR PENGESAHAN LAPORAN AKHIR PENELITIAN
TAHUN 2022**

1. Judul Penelitian: : Praktik Akuntansi Keberlanjutan dalam Ketidakpastian Usaha dan Ketidakpastian Lingkungan Setelah Tahun 2022
2. Peneliti Utama
- a. Nama Lengkap : Rene Johannes
- b. Jenis Kelamin : Laki-laki
- c. Pangkat/Golongan/NIDN : Asisten Ahli/3A/0314115902
- d. Bidang Keahlian : Akuntansi/Keuangan
- e. Program Studi : Akuntansi
3. Tim Peneliti

No	Nama	Bidang Keahlian	Program Studi
01.	Rene Johannes	Akuntansi/Keuangan	Akuntansi
-	-	-	-

4. Jangka Waktu Penelitian dan Pendanaan
- a. Jangka Waktu Penelitian yang Diusulkan : 3 (tiga) bulan
- b. Biaya Total yang Diusulkan : Rp19.826.000,00
- c. Biaya yang Disetujui : Rp19.826.000,00

Jakarta, 17 Maret 2022

Menyetujui,

**Ketua Lembaga Penelitian dan
Pengembangan**

(Deffi Ayu Puspito Sari,
S.TP.,M.Agr.Sc.,Ph.D., IPM)

NIDN: 0308078203

Peneliti Utama



(Dr. Rene Johannes, SE., M.Si., MM,
M.Si., Ak., CA., CPMA, CPA (Aust.),
CSCA, ASEAN-CPA, CSRA)

NIDN: 0314115902

ABSTRAK

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk menganalisis bagaimana praktik akuntansi keberlanjutan telah berkembang secara sukarela karena kebutuhan akan informasi, tekanan untuk pelaporan yang lebih transparan, dan kebutuhan perusahaan untuk menjelaskan model bisnis secara lebih rinci dalam ketidakpastian usaha dan ketidakpastian lingkungan setelah tahun 2022. Kerangka pengungkapan berkembang pertama kali sebagai inisiatif industri untuk menangkis kritik, dan kemudian sebagai inisiatif independen bagi kelompok penekan untuk melihat inisiatif industri seringkali dangkal dan menuntut akuntabilitas yang lebih luas. Metode penelitian yang digunakan adalah kualitatif berdasarkan studi kepustakaan. Standar Global Reporting Initiative (GRI) sekarang paling banyak digunakan dari kerangka kerja independen ini. Standar GRI memerlukan proses identifikasi pemangku kepentingan, diikuti dengan proses pelibatan pemangku kepentingan untuk mengidentifikasi masalah sosial dan lingkungan material yang harus dicakup dalam pengungkapan. Hasil atau kesimpulan dari penelitian ini bahwa pelaporan yang terintegrasi dapat dilihat sebagai perkembangan terkini dalam pelaporan masalah ketidakpastian sosial dan lingkungan. Kerangka kerja dan gambaran singkat dari perkembangan lingkungan usaha.

Kata kunci: *environmental uncertainty, integrated reporting, sustainability accounting*

DAFTAR ISI

Halaman Sampul.....	01
Lembar Pengesahan Laporan Akhir Penelitian Tahun 2022.....	02
Abstrak.....	03
Daftar Isi.....	04
Bab I : Pendahuluan.....	05
Bab II : Tinjauan Pustaka.....	07
Bab III : Metode Penelitian.....	09
Bab IV : Hasil dan Pembahasan.....	10
Bab V : Kesimpulan.....	15
Daftar Pustaka.....	16
Lampiran.....	21
Rancangan Anggaran Biaya.....	22

BAB I

PENDAHULUAN

Praktik akuntansi keberlanjutan telah berkembang secara “sukarela” karena adanya kebutuhan akan informasi, tekanan terhadap kebutuhan pelaporan yang lebih transparan, dan kebutuhan perusahaan untuk menjelaskan model bisnis mereka secara lebih rinci. Kerangka pengungkapan berkembang secara sistematis sesuai perkembangan zaman. Pertama, sebagai inisiatif industri untuk menangkis kritik, dan kedua, sebagai inisiatif independen dalam kelompok penekan melihat melalui inisiatif industri sering dangkal dan menuntut akuntabilitas yang lebih luas. Standar GRI sekarang ini paling banyak digunakan dari kerangka kerja independen yang berkembang secara masif. Standar GRI memerlukan proses identifikasi pemangku kepentingan, diikuti dengan proses pelibatan pemangku kepentingan untuk mengidentifikasi masalah sosial dan lingkungan material yang harus dicakup dalam pengungkapan. Pelaporan terintegrasi dapat dilihat sebagai perkembangan terkini dalam pelaporan masalah sosial dan lingkungan.

Penelitian ingin memberikan gambaran tentang peran akuntansi keberlanjutan dan pelaporan terintegrasi, termasuk latar belakangnya mengenai apa yang dapat dipelajari dari perspektif teoritis berbeda yang telah diterapkan pada praktik ini, terutama seputar pertanyaan mengapa organisasi memilih untuk mengungkapkan, informasi yang dibutuhkan pemangku kepentingan, apa yang terjadi pada pelaporan setelah krisis; penentu pengungkapan lainnya, adanya konsekuensi pengungkapan, pengungkapan oleh sektor publik dan organisasi nirlaba, sistem pengendalian manajemen yang mendukung pelaporan; dan jaminan keberlanjutan dan pelaporan terintegrasi.

Untuk sebagian besar perusahaan atau organisasi lainnya pada abad ke-20, pelaporan dan sistem akuntansi yang mendukungnya dijelaskan sebagai perkembangan teknis rasional yang didorong oleh kebutuhan informasi pasar modal (Watts & Zimmerman 1976; Watts & Zimmerman 1978; Hopwood 1987). Perubahan norma sosial selama tahun 1960-an dan 1970-an membawa tekanan yang berbeda untuk menanggung pada perusahaan dan organisasi lain, termasuk tuntutan untuk akuntabilitas sosial dan lingkungan yang lebih besar. Hal ini menyebabkan konseptualisasi yang lebih luas dari sifat akuntansi, mulai tahun 1980-an. Menggunakan teori yang diambil dari sosiologi, psikologi dan ilmu politik, peneliti mulai menjelaskan akuntansi sebagai

konstruksi sosial yang dinamis dan lebih dari sekadar sistem pemrosesan informasi yang netral (Burchell dkk., 1980; Cooper 1980; Hoskin & Macve 1986; Hopwood 1987). Yang menarik dalam penelitian ini adalah kesadaran bahwa pelaporan perusahaan dapat memberikan 'pertanggungjawaban' kepada konstituen yang tertarik dan bahwa sistem akuntansi konvensional dapat diperluas untuk mencakup lebih dari sekadar pelaporan masalah keuangan (Hopwood 1987; Gray dkk., 1995). Munculnya berbagai jenis pelaporan non-keuangan atau Lingkungan, Sosial dan Tata-kelola/LST (ESG/Environmental, Social, and Governance) oleh karena itu, dapat dilihat sebagai praktik yang didorong oleh tuntutan dan tekanan para pemangku kepentingan, dan kebutuhan organisasi untuk menanggapi tekanan ini dengan menjelaskan dampak sosial dan lingkungan mereka. Inisiatif pengungkapan sukarela ini, di beberapa yurisdiksi, mengarah pada peraturan yang mengamankan pengungkapan sosial dan lingkungan (De Villiers & Alexander, 2014).

Berkaitan dengan praktik akuntansi keberlanjutan dalam ketidakpastian usaha dan ketidakpastian lingkungan setelah tahun 2022, terutama setelah masa puncak pandemi diprediksi akan berlalu, berkisar pada seputar pertanyaan mengapa perlunya organisasi khususnya yang berorientasi laba memilih untuk mengungkapkan kegiatan operasional, informasi yang dibutuhkan pemangku kepentingan, apa yang terjadi pada pelaporan setelah krisis dalam 2 (dua) tahun terakhir; penentu pengungkapan lainnya, adanya konsekuensi pengungkapan, pengungkapan oleh sektor publik dan organisasi nirlaba, sistem pengendalian manajemen (MCS/Management Control System) yang mendukung pelaporan; dan adanya jaminan keberlanjutan serta dapat disusunnya pelaporan terintegrasi.

Sektor publik dan nirlaba merupakan bagian penting dari ekonomi global sebagai pendorong keberlanjutan melalui pelaporan terpadu di sektor ini dan menangani tantangan yang terlibat dalam berbagai sektor usaha. Selanjutnya, ingin diketahui sampai sejauh manaperan yang dimainkan oleh MCS dalam mendukung pelaporan keberlanjutan dan strategi keberlanjutan, mengusulkan kerangka MCS berkelanjutan untuk memberi kontrol baik secara formal dan informal. MCS dapat digunakan pula untuk tujuan operasional dan strategis. Pertanyaan mengenai jaminan eksternal atas laporan berkelanjutan dan laporan terintegrasi, yang digunakan sebagai metode untuk meningkatkan kredibilitas laporan di antara para pemangku kepentingan. Para

profesional akuntansi melihat jaminan sebagai kesempatan untuk memperluas layanan mereka ke wilayah baru.

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk menganalisis bagaimana praktik akuntansi keberlanjutan telah berkembang secara sukarela karena kebutuhan akan informasi, tekanan untuk pelaporan yang lebih transparan, dan kebutuhan perusahaan untuk menjelaskan model bisnis secara lebih rinci dalam ketidakpastian usaha dan ketidakpastian lingkungan setelah tahun 2022. Kerangka pengungkapan berkembang pertama kali sebagai inisiatif industri untuk menangkis kritik, dan kemudian sebagai inisiatif independen bagi kelompok penekan untuk melihat inisiatif industri seringkali dangkal dan menuntut akuntabilitas yang lebih luas.

BAB II TINJAUAN PUSTAKA

Pandangan konvensional di jantung penelitian akuntansi membawa pada arus utama awal adalah bahwa tujuan perusahaan adalah untuk memaksimalkan keuntungan bagi pemegang saham. Posisi ini ditantang dan digantikan dengan model yang lebih inklusif, yang menekankan bahwa perusahaan bertanggung jawab kepada kelompok pemangku kepentingan yang luas daripada hanya pemegang sahamnya (Solomon, 2010). Hasilnya adalah bahwa perusahaan tidak dapat fokus hanya pada menghasilkan keuntungan finansial untuk kepentingan penyedia utang dan ekuitas. Sebuah perusahaan beroperasi sesuai dengan izin sosial yang mengharuskan pengelolaan kekhawatiran dan harapan terkait LST untuk memastikan dukungan berkelanjutan para pemangku kepentingan dan pada gilirannya, kemampuan organisasi untuk melanjutkan kelangsungan usahanya (De Villiers & Barnard, 2000; Deegan, 2002; Atkins & Maroun, 2015).

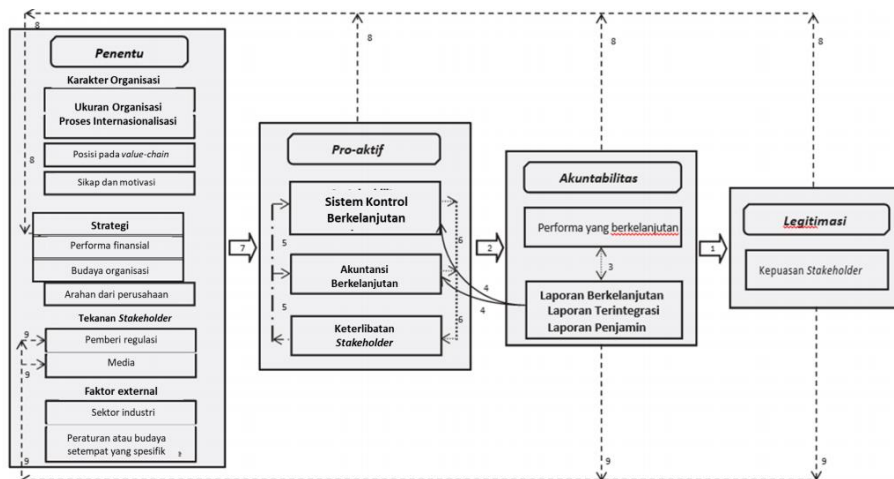
Dari perspektif ini, bentuk awal pelaporan LST dan munculnya standar pelaporan non-keuangan yang terkodifikasi, dapat dijelaskan sebagai produk dari tekanan pemangku kepentingan yang mendasari dan keinginan untuk mendapatkan dan mempertahankan legitimasi organisasi. Ketika pelaporan LST menjadi terkenal sejak 1980-an dan seterusnya, para ilmuwan sosial berpendapat bahwa fungsinya dalam praktik bisnis kontemporer semakin diterima begitu saja (DeVilliers & Alexander 2014). Ini telah berkontribusi pada pelembagaan banyak kode praktik terbaik yang

menangani berbagai aspek pelaporan non-keuangan dan telah memberikan dorongan lebih lanjut untuk proliferasi apa yang sekarang disebut sebagai pelaporan berkelanjutan dan terintegrasi.

Aliran penelitian berkaitan dengan determinan ekonomi dan konsekuensi dari berbagai jenis pengungkapan non-keuangan. Ini melibatkan pembangunan hubungan antara tingkat pengungkapan non-keuangan dan: kinerja ekonomi dan nilai perusahaan (untuk contoh terbaru, dapat lihat pada: Cahan dkk., 2016; De Klerk & De Villiers, 2012; De Klerk dkk., 2015; Marcia dkk., 2015; De Villiers & Marques, 2016); proses organisasi (Churet & Eccles, 2014); kualitas manajemen (Churet & Eccles, 2014); dan asimetri informasi (De Klerk & De Villiers, 2012). Kerangka kerja ini didasarkan pada kasus bisnis untuk pelaporan non-keuangan dan teori keagenan (Agency Theory). (Jensen, 1986)

Istilah 'pelaporan keberlanjutan' digunakan dalam buku ini sebagai sinonim atau istilah kolektif untuk pelaporan sosial dan lingkungan; pelaporan tanggung jawab sosial perusahaan; pelaporan LST; pelaporan terintegrasi dan bentuk lain yang disebut pelaporan non-keuangan. Penggunaan istilah yang tidak konsisten (dan definisi untuk jenis pelaporan ini) menunjukkan bahwa akuntansi 'keberlanjutan' seringkali bukan tentang meningkatkan keberlanjutan, tetapi tentang pengungkapan informasi yang berkaitan dengan keberlanjutan sosial dan lingkungan dan menggambarkan, misalnya, peningkatan efisiensi lingkungan. Perspektif kritis bahwa pelaporan keberlanjutan mungkin telah ditangkap oleh organisasi yang kuat sebagai metode untuk menghadapi tekanan pemangku kepentingan dan bahwa kapitalisme, orientasi maskulin, daya saing bisnis, dan peran akuntansi dalam proses ini sebenarnya dapat merusak keberlanjutan yang sebenarnya. belum dieksplorasi secara mendalam.

Praktik pelaporan berkelanjutan dan terintegrasi, memberikan gambaran tentang perkembangan dan evolusinya sebagai akibat dari tekanan pemangku kepentingan untuk mengungkapkan lebih banyak informasi sosial dan lingkungan, dan kebutuhan organisasi untuk menjelaskan dampaknya. Kerangka pengungkapan berkembang untuk memungkinkan organisasi mengklaim bahwa pengungkapan mereka mematuhi praktik terbaik, dengan GRI sekarang menjadi faktor terpenting dalam bidang ini, seperti yang dijelaskan pada diagram berikut:



Gambar 2.1: Diagram Pelaporan Berkelanjutan (Sumber: Al Razi dkk., 2015)

BAB III METODE PENELITIAN

Metode penelitian yang digunakan adalah kualitatif berdasarkan studi kepustakaan. Standar GRI sekarang paling banyak digunakan dari kerangka kerja independen ini. Standar GRI memerlukan proses identifikasi pemangku kepentingan, diikuti dengan proses pelibatan pemangku kepentingan untuk mengidentifikasi masalah sosial dan lingkungan material yang harus dicakup dalam pengungkapan. Hasil atau kesimpulan dari penelitian ini bahwa pelaporan yang terintegrasi dapat dilihat sebagai perkembangan terkini dalam pelaporan masalah ketidakpastian sosial dan lingkungan. Kerangka kerja dan gambaran singkat dari perkembangan lingkungan usaha.

BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN

Berdasarkan data dan analisis yang dilakukan oleh LPEM FEB-UI (2022) Tingkat pertumbuhan PDB (Produk Domestik Bruto) Indonesia pada Triwulan-IV 2021 diperkirakan sebesar 5,1% (y.o.y), sehingga perkiraan untuk FY 2021 berada di angka 3,7% (y.o.y). Potensi lonjakan ke tingkat pertumbuhan PDB pra-pandemi di 4,9%-5,1% (y.o.y) pada tahun 2022.

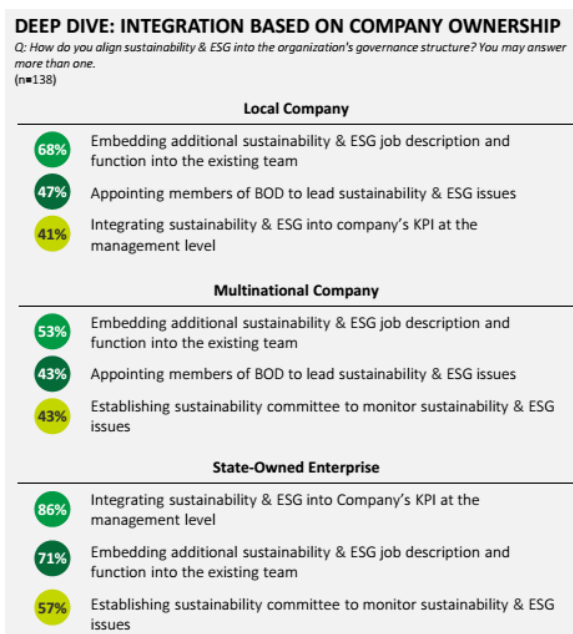
- a. Program stimulus besar-besaran telah menciptakan pemulihan permintaan yang lebih cepat dari perkiraan di berbagai negara, terutama negara maju, menciptakan masalah baru berupa peningkatan tekanan inflasi karena sisi penawaran relatif lebih lambat untuk merespons;
- b. Naiknya biaya produksi juga menambah tekanan pada inflasi spiral saat ini. Pada 3 (tiga) jalur utama yang berkontribusi terhadap kenaikan biaya produksi adalah kenaikan harga tenaga kerja (upah), harga bahan input, dan biaya energi;
- c. Indonesia diuntungkan dengan tingginya harga energi, terutama batu bara dan CPO (Crude Palm Oil), karena neraca perdagangan dua komoditas ini tercatat surplus sebesar USD54 miliar pada tahun 2021, setara dengan 157% dari total surplus perdagangan Indonesia tahun 2021 sebesar USD35 miliar;
- d. Selain itu, kenaikan harga energi juga mendorong kenaikan penerimaan negara dan berhasil mencatatkan realisasi sementara Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) sebesar Rp451,98 triliun pada tahun 2021, setara dengan 151% dari target APBN (Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara) 2021 dan 31,46% lebih tinggi dibandingkan dengan realisasi tahun sebelumnya;
- e. Program normalisasi moneter yang lebih cepat dari perkiraan yang diambil oleh negara-negara maju sebagai langkah untuk mengendalikan inflasi kemungkinan akan memiliki dampak yang relatif terkendali terhadap sektor keuangan Indonesia;
- f. Dibandingkan dengan taper tantrum 2013, tapering yang sedang berlangsung berdampak lebih kecil pada arus keluar modal Indonesia dan depresiasi Rupiah karena kepemilikan asing yang lebih rendah atas aset Indonesia, adanya surplus perdagangan dibandingkan dengan defisit saat itu, dan pandangan serta komunikasi yang lebih jelas dari Bank Sentral AS (The Fed);

g. Risiko inflasi di Indonesia relatif rendah karena stimulus yang relatif lebih rendah dan kemajuan pemulihan bertahap yang memungkinkan sisi penawaran memiliki lebih banyak waktu untuk mengejar kenaikan permintaan.

Berdasarkan hasil survei yang dilaksanakan oleh Deloitte Konsultan Indonesia (2021) mengenai peranan para Chief Executive Officer (CEO) dalam mengawal keberlanjutan dan LST:



Gambar 4.2.1: Penerapan Keberlanjutan dan LST pada Struktur Tata-kelola (Sumber: Deloitte)



Gambar 4.2.2.: Integrasi Berdasarkan Kepemilikan Perusahaan (Sumber: Deloitte)

Pelaporan Keberlanjutan

Pelaporan keberlanjutan memiliki sejarah panjang (De Villiers dkk., 2014a). Sebagai contoh, Lewis dkk. (1984) menemukan bukti bentuk awal akuntansi keuangan untuk karyawan sejak tahun 1917. Ada juga contoh bentuk dasar pelaporan tanggung jawab sosial perusahaan (CSR/Corporate Social Responsibility) oleh perusahaan baja Amerika Serikat dan perusahaan pertambangan Australia dalam laporan perusahaan mereka yang diterbitkan pada akhir 1890-an dan awal 1900-an (Hogner 1982; Guthrie & Parker, 1989). Peningkatan pengungkapan sering kali mengikuti tekanan pemangku kepentingan yang terus meningkat setelah insiden sosial atau lingkungan, seperti tumpahan minyak besar (Patten, 1992; Summerhays & De Villiers 2012). Pemangku kepentingan tidak selalu ditenangkan dengan pengungkapan tambahan, karena mereka sadar bahwa organisasi dapat menggunakan pengungkapan ini untuk menekankan aspek positif dan mengabaikan aspek negatif.

Untuk meningkatkan kredibilitas pengungkapan tanggung jawab sosial dan lingkungan mereka, perusahaan membentuk organisasi yang dimaksudkan untuk secara independen menentukan perusahaan apa yang harus dilaporkan dalam industri tersebut. Perusahaan kemudian dapat berlangganan kerangka pengungkapan badan 'independen' ini. Tentu saja, pemangku kepentingan yang canggih segera memahami taktik ini. Badan-badan yang benar-benar independen, masing-masing dengan kerangka pengungkapan sosial dan lingkungan mereka sendiri, bermunculan, memberikan pilihan kerangka kerja yang lebih luas bagi perusahaan. Penyedia kerangka kerja bersaing untuk menjadi yang paling relevan dan kredibel. Kerangka kerja yang paling banyak digunakan saat ini adalah standar yang dikeluarkan oleh GRI (KPMG, 2015).

Pelaporan keberlanjutan sekarang menjadi hal yang biasa, dengan sebagian besar perusahaan besar dunia mengungkapkan informasi keberlanjutan dari perusahaannya (KPMG 2015; Hughen dkk., 2014). Dimana perusahaan-perusahaan ini menentukan kerangka kerja yang sebagian besar menyebutkan GRI sebagai acuan utama (KPMG 2015). Organisasi pemerintah dan nonpemerintah sering kali juga mengungkapkan informasi keberlanjutan dan menggunakan kerangka kerja dari GRI.

GRI tidak mendefinisikan 'keberlanjutan', secara langsung tetapi pedomannya menunjukkan model 3 (tiga) dimensi berdasarkan dampak ekonomi, lingkungan, dan sosial organisasi (Lamberton 2005). Menurut GRI (2016, p. 3), standarnya: menciptakan

bahasa yang umum untuk organisasi dan pemangku kepentingan, yang dengannya dampak ekonomi, lingkungan, dan sosial organisasi dapat dikomunikasikan dan dipahami. Standar dirancang untuk meningkatkan daya banding global dan kualitas informasi mengenai dampak ini, sehingga memungkinkan transparansi dan akuntabilitas yang lebih besar bagi organisasi.

Pedoman GRI terdiri dari standar yang bersifat universal dan standar yang spesifik sesuai topik tertentu. Prinsip-prinsip pelaporan inti (GRI 100); merekomendasikan pengungkapan umum yang dirancang untuk memberikan konteks tentang suatu organisasi (GRI 102); dan memberikan panduan tentang cara menangani masalah material, yang dikelola dan dilaporkan menggunakan standar topik tertentu (GRI 103). Hal ini termasuk GRI 200, GRI 300 dan GRI 400, yang berhubungan dengan pelaporan ekonomi, lingkungan serta dampak sosial (GRI 2016). Standar GRI mengharuskan untuk melakukan identifikasi terhadap para pemangku kepentingan perusahaan yang dilanjutkan dengan pengikutsertaan para pemangku kepentingan dalam mengidentifikasi persoalan yang dianggap material khususnya menyangkut kondisi sosial dan lingkungan yang harus tertampung dalam sebuah pengungkapan perusahaan.

Pelaporan Terintegrasi

Pelaporan terintegrasi dapat dilihat sebagai perkembangan terbaru dalam pelaporan keberlanjutan (De Villiers dkk., 2014b; De Villiers dkk., 2017). Kerangka kerja pelaporan terintegrasi yang baru-baru ini diterbitkan adalah hasil dari upaya International Integrated Reporting Council (IIRC), Komite Pelaporan Terintegrasi Afrika Selatan (IRCSA), GRI, Dewan Bisnis Dunia untuk Pembangunan Berkelanjutan, Institut Sumber Daya Dunia, Proyek Pengungkapan Karbon, dan UN Global Compact (IRCSA, 2011; De Villiers dkk., 2014b; Atkins & Maroun, 2015). IIRC menyatakan bahwa tujuan utama dari laporan terintegrasi adalah untuk: “Menjelaskan kepada penyedia modal keuangan bagaimana sebuah organisasi menciptakan nilai dari waktu-ke-waktu. Laporan terintegrasi menguntungkan semua pemangku kepentingan yang tertarik pada kemampuan organisasi untuk menciptakan nilai dari waktu-ke-waktu, termasuk karyawan, pelanggan, pemasok, mitra bisnis, komunitas lokal, pembuat peraturan, dan pembuat kebijakan.” (IIRC 2013, hal. 4).

Seperti pelaporan keberlanjutan di bawah GRI, pelaporan terintegrasi juga telah mendapatkan kritik dari berbagai pihak. Beberapa pihak khawatir bahwa penekanan yang diberikan pada penyedia utang dan ekuitas akan membatasi komitmen mereka terhadap tanggung jawab sosial dan lingkungan (Flower, 2015; Thomson, 2015). Hal ini didukung oleh fakta bahwa meskipun pelaporan terintegrasi telah dikaitkan dengan peningkatan tingkat pengungkapan terkait LST, bagian pertama laporan terintegrasi seringkali berisi informasi umum dan berulang (Solomon & Maroun 2012; Stent & Dowler, 2015; Raemaekers, 2016). Pada penelitian terdahulu yang sebagian besar berbasis di Australia, juga menantang sejauh mana pelaporan terintegrasi akan menghasilkan reformasi proses bisnis dan strategi yang diperlukan untuk mendorong keberlanjutan yang nyata (Brown & Dillard, 2014; Higgins dkk., 2014; Stubbs & Higgins, 2014).

Namun demikian, pelaporan terintegrasi berpotensi menjadi sarana utama bagi organisasi untuk berkomunikasi dengan pemangku kepentingan. IIRC mengeluarkan kerangka pelaporan terintegrasi-nya pada tahun 2013, dan lebih dari 100 (seratus) perusahaan telah berpartisipasi dalam studi percontohan global bekerja sama dengan berbagai jaringan investor) mengenai format pelaporan baru tersebut (De Villiers dkk., 2014b). Di Afrika Selatan, keputusan telah diambil untuk mewajibkan perusahaan yang terdaftar untuk menyiapkan laporan terintegrasi atau memberikan alasan yang jelas untuk tidak melakukannya, sehingga pelaporan terintegrasi secara efektif wajib untuk perusahaan besar di Afrika Selatan (Atkins & Maroun, 2015).

Meskipun pada tempat lain dengan yurisdiksi lain hal tersebut tidak menjadi suatu kewajiban, banyak prinsip dalam kerangka IIRC yang telah diterapkan oleh perusahaan di AS, Uni Eropa, dan Australia (Massie, 2010; De Villiers dkk., 2014b; Dumay dkk., 2017; Guthrie dkk., 2017). Penelitian tentang keadaan pelaporan terintegrasi di Afrika Selatan, yang diterima secara luas sebagai pionir di bidang ini, juga menunjukkan bahwa perusahaan mulai menginternalisasi ketentuan kerangka kerja IIRC dan memberikan pelaporan yang lebih berkualitas tentang indikator keberlanjutan.

BAB V

KESIMPULAN

Penelitian ini menyimpulkan tentang kemungkinan pada masa mendatang mengenai praktik dan penelitian dari akuntansi berkelanjutan dan pelaporan terintegrasi, yang tentu saja mencakup pelaporan, sistem pengendalian manajemen, dan jaminan. Banyak dari praktik ini telah dilembagakan dan diterima sebagai persyaratan sebuah perusahaan, yang memberikan sebuah pandangan dan ketertarikan baru bagi para peneliti. Pada masa mendatang, tren laporan berkelanjutan ini kemungkinan akan terus berlanjut dan dipergunakan.

Implikasi

Pelaporan yang berkelanjutan dan terintegrasi, serta jaminan atas laporan-laporan ini, merupakan bagian dari akuntabilitas. Akuntabilitas memengaruhi legitimasi organisasi dalam jangka panjang. Keberlanjutan dan pelaporan terintegrasi bergantung pada informasi yang diberikan dan dikelola oleh akuntansi keberlanjutan, sistem kontrol manajemen keberlanjutan, dan keterlibatan pemangku kepentingan. Beberapa faktor lain, yang diberi label "penentu" dalam kerangka kerja ini, memengaruhi akuntansi keberlanjutan dan pelaporan terintegrasi. Kerangka kerja ini menetapkan panggung untuk diskusi tentang perlakuan konsep-konsep ini dalam tataran yang lebih dalam.

Batasan

Batasan utama dalam penelitian ini terutama pada unsur ketidakpastian. Apalagi jika dikaitkan dengan konsep VUCA (Volatility, Uncertainty, Complexity, dan Ambiguity). Sebenarnya apabila dikaji secara komprehensif, kondisi setelah pandemi atau tepatnya setelah tahun 2022 seluruh faktor pada konsep VUCA tersebut harus dihadapi. Oleh karena itu diperlukan CEO yang tanggap, tangguh, tanggon dan trengginas agar bisa menghadapi situasi yang tidak mudah ini.

DAFTAR PUSTAKA

- Alrazi, B., De Villiers, C. & van Staden, C. J., (2015). A Comprehensive Literature Review on, and the Construction of a Framework for, Environmental Legitimacy, Accountability and Proactivity. *Journal of Cleaner Production*, No.102, pp. 44–57.
- Atkins, J., Atkins, B., Thomson, I. & Maroun, W., (2015). ‘Good’ News from Nowhere: Imagining Utopian Sustainable Accounting. *Accounting, Auditing & Accountability Journal*, No. 28 Vol. (5), pp. 651–670.
- Atkins, J. & Maroun, W., (2015). Integrated Reporting in South Africa in 2012: Perspectives from South African Institutional Investors. *Meditari Accountancy Research*, No. 23 Vol. (2), pp. 197–221.
- Bebbington, J., Higgins, C. & Frame, B., (2009). Initiating Sustainable Development Reporting: Evidence from New Zealand. *Accounting, Auditing & Accountability Journal*, No. 22 Vol. (4), pp. 588–625.
- Brown, J. & Dillard, J., (2014). Integrated Reporting: on the Need for Broadening Out and Opening up. *Accounting, Auditing & Accountability Journal*, No. 27 Vol. (7), pp. 1120–1156.
- Burchell, S., Clubb, C., Hopwood, A., Hughes, J. & Nahapiet, J., (1980). The Roles of Accounting in Organizations and Society. *Accounting, Organizations and Society*, No. 5 Vol. (1), pp. 5–27.
- Cahan, S., De Villiers, C., Jeter, D., Naiker, V. & Van Staden, C., (2016). Are CSR Disclosures Value Relevant? Cross-country evidence. *European Accounting Review*, No. 25 Vol. (3), pp. 579–611.
- Churet, C. Eccles, R. G., (2014). Integrated Reporting, Quality of Management, and Financial Performance. *Journal of Applied Corporate Finance*, No. 26 Vol. (1), pp. 56–64.
- Cooper, D., (1980). Discussion of Towards a Political Economy of Accounting. *Accounting, Organizations and Society*, No. 5 Vol. (1), pp. 161–166.
- De Klerk, M. & De Villiers, C., (2012). The Value Relevance of Corporate Responsibility Reporting: South African Evidence. *Meditari Accountancy Research*, No. 20 Vol. (1), pp. 21–38.
- De Klerk, M., De Villiers, C. & van Staden, C., (2015). The Influence of Corporate Social Responsibility Disclosure on Share Prices: Evidence from the United Kingdom. *Pacific Accounting Review*, No. 27 Vol. (2), pp. 208–228.
- De Villiers, C. and Alexander, D., (2014). The Institutionalisation of Corporate Social Responsibility Reporting. *The British Accounting Review*, No. 46 Vol. (2), pp. 198–212.

- De Villiers, C. J. & Barnard, P., (2000). Environmental Reporting in South Africa from 1994 to 1999: a Research Note. *Meditari Accountancy Research*, No. 8 Vol. (1), pp. 15–23.
- De Villiers, C., Low, M. & Samkin, G., (2014a). The Institutionalisation of Mining Company Sustainability Disclosures. *Journal of Cleaner Production*, No. 84, pp. 51–58.
- De Villiers, C. & Marques, A., (2016). Corporate Social Responsibility, Country-level Predispositions, and the Consequences of Choosing a Level of Disclosure. *Accounting and Business Research*, No. 46 Vol. (2), pp. 167–195.
- De Villiers, C., Rinaldi, L. & Unerman, J., (2014b). Integrated Reporting: Insights, Gaps and an Agenda for Future Research. *Accounting, Auditing & Accountability Journal*, No. 27 Vol. (7), pp. 1042–1067.
- De Villiers, C., Venter, E. & Hsiao, P., (2017). Integrated Reporting: Background, Measurement Issues, Approaches and an Agenda for Future Research. *Accounting & Finance*.
- Deegan, C., (2002). Introduction: The Legitimising Effect of Social and Environmental Disclosures – a Theoretical Foundation. *Accounting, Auditing & Accountability Journal*, No. 15 Vol. (3), pp. 282–311.
- Deloitte Konsultan Indonesia (2021). CEO Survey 2021: Survey on the Role of CEOs in Advancing Sustainability & ESG.
- Dillard, J. & Reynolds, M., (2008). Green Owl and the Corn Maiden. *Accounting, Auditing & Accountability Journal*, No. 21 Vol. (4), pp. 556–579.
- Dumay, J., Guthrie, J. and La Torre, M., (2017). Barriers to Implementing the International Integrated Reporting Framework: A Contemporary Academic Perspective. *Meditari Accountancy Research*, No. 25 Vol. (4).
- Eccles, R. G. & Krzus, M. P., (2010). *One Report: Integrated Reporting for a Sustainable Strategy*. Hoboken, NJ: Wiley. Published online October 2015, doi:10.1002/9789199960.
- Flower, J., (2015). The International Integrated Reporting Council: A Story of Failure. *Critical Perspectives on Accounting*, No. 27, pp. 1–17.
- Gray, R., Kouhy, R. & Lavers, S., (1995). Corporate Social and Environmental Reporting: A Review of the Literature and a Longitudinal Study of UK Disclosure. *Accounting, Auditing & Accountability Journal*, No. 8 Vol. (2), pp. 47–77.
- GRI, (2016). Consolidated set of GRI Sustainability Reporting Standards (2016). Available: www.globalreporting.org/standards/gri-standards-download-center/?g=ae2e23b8-4958-455ca9df-ac372d6ed9a8
www.globalreporting.org/reporting/g4/Pages/default.aspx [Accessed 10 February 2017].

- Guthrie, J., Manes-Rossi, F. & Orelli, R. L., (2017). Integrated Reporting and Integrated Thinking in Italian Public Sector Organisations. *Meditari Accountancy Research*, No. 25 Vol. (4).
- Guthrie, J. & Parker, L. D., (1989). Corporate Social Reporting: A Rebuttal of Legitimacy Theory. *Accounting and Business Research*, No. 19 Vol. (76), pp. 343–352.
- Higgins, C., Stubbs, W. & Love, T., (2014). Walking the Talk(s): Organisational Narratives of Integrated Reporting. *Accounting, Auditing & Accountability Journal*, No. 27 Vol. (7), pp. 1090–1119.
- Hogner, R. H., (1982). Corporate Social Reporting: Eight Decades of Development at US Steel. *Research in Corporate Performance and Policy*, No. 4 Vol. (1), pp. 243–250.
- Hopwood, A. G., (1987). The Archaeology of Accounting Systems. *Accounting, Organizations and Society*, No. 12 Vol. (3), pp. 207–234.
- Hoskin, K. W. & Macve, R. H., (1986). Accounting and the Examination: A Genealogy of Disciplinary Power. *Accounting, Organizations and Society*, No. 11 Vol. (2), pp. 105–136.
- Hughen, L., Lulseged, A. & Upton, D., (2014). Improving Stakeholder Value through Sustainability and Integrated Reporting. *CPA Journal*, March, pp. 57–61.
- IIRC, (2013). The International Framework: Integrated Reporting. Available: www.theiirc.org/wp-content/uploads/2013/12/13-12-08-THE-INTERNATIONAL-IR-FRAMEWORK-2-1.pdf [Accessed 1 October 2013].
- IRCSEA, (2011). Framework for Integrated Reporting and the Integrated Report. Available: www.sustainabilitysa.org [Accessed 5 June 2012].
- Jensen, M. (1986) Agency Costs of Free Cash Flow, Corporate Finance, and Takeovers. *American Economic Review*, Vol. 76 No. (2), pp. 323-329.
- Jones, M. J. & Solomon, J. F., (2013). Problematising Accounting for Biodiversity. *Accounting, Auditing & Accountability Journal*, No. 26 Vol. (5), pp. 668–687.
- King, M., (2016). Comments On: Integrated Reporting, GARI Conference. Henley on Thames, UK, 23 October.
- KPMG, (2015). The KPMG Survey of Corporate Responsibility Reporting 2015. Available: <https://home.kpmg.com/xx/en/home/insights/2015/11/kpmg-international-survey-of-corporate-responsibility-reporting-2015.html> [Accessed 17 May 2017].
- Lamberton, G., (2005). Sustainability Accounting – A Brief History and Conceptual Framework. *Accounting Forum*, No. 29 Vol. (1), pp. 7–26.

- Lewis, N. R., Parker, L. D. & Sutcliffe, P., (1984). Financial Reporting to Employees: The Pattern of Development 1919 to 1979. *Accounting, Organizations and Society*, No. 9 Vol. (3–4), pp. 275–289.
- LPEM FEB-UI (2022). *Seri Analisis Makroekonomi: Indonesia Ekonomi Outlook*. Triwulan-I 2022.
- Mansoor, H. & Maroun, W., (2015). Biodiversity Reporting in the South African Food and mining sectors. In: *27th International Congress on Social and Environmental Accounting Research*, 27 August 2015, Egham, United Kingdom. United Kingdom: Centre for Social and Environmental Accounting Research.
- Marcia, A., Maroun, W. & Callaghan, C., (2015). Value Relevance and Corporate Responsibility Reporting in the South African Context: An Alternate View Post King-III. *South African Journal of Economic and Management Sciences*, No. 18 Vol. (4), pp. 500–518.
- Maroun, W., (2017). Assuring the Integrated Report: Insights and Recommendations from Auditors and Preparers. *The British Accounting Review*, No. 49 Vol. (3), pp. 329–346.
- Maroun, W., Coldwell, D. & Segal, M., (2014). SOX and the Transition from Apartheid to Democracy: South African Auditing Developments through the Lens of Modernity Theory. *International Journal of Auditing*, No. 18 Vol. (3), pp. 206–212.
- Massie, R. K., (2010). Accounting and Accountability: Integrated Reporting and the Purpose of the Firm. In: R. G. Eccles, B. Cheng and D. Saltzman, eds. *The Landscape of Integrated Reporting: Reflections and Next Steps*. Cambridge, MA: The President and Fellows of Harvard College Cambridge, pp. 2–8.
- McNally, M.-A., Cerbone, D. & Maroun, W., (2017). Exploring the Challenges of Preparing an Integrated Report. *Meditari Accountancy Research*, No. 25 Vol. (4), Forthcoming.
- Michelon, G., Pilonato, S. & Ricceri, F., (2015). CSR Reporting Practices and the Quality of Disclosure: An Empirical Analysis. *Critical Perspectives on Accounting*, No. 33, pp. 59–78.
- Milne, M. J. & Patten, D. M., (2002). Securing Organizational Legitimacy: An Experimental Decision Case Examining the Impact of Environmental Disclosures. *Accounting, Auditing & Accountability Journal*, No. 15 Vol. (3), pp. 372–405.
- Milne, M., Tregidga, H. & Walton, S., (2009) Words Not Actions! The Ideological Role of Sustainable Development Reporting. *Accounting, Auditing and Accountability Journal*, No. 22 Vol. (8), pp. 1211–1257.
- Patten, D. M., (1992). Intra-industry Environmental Disclosures in Response to the Alaskan Oil Spill: A Note on Legitimacy Theory. *Accounting, Organizations and Society*, No. 17 Vol. (5), pp. 471–475.

- PwC, (2014). Value Creation: The Journey Continues. A Survey of JSE Top-40 Companies' Integrated Reports. Available: www.pwc.co.za/en/assets/pdf/integrated-reporting-survey-2014.pdf [Accessed 7 August 2015].
- PwC, (2015). Integrated Reporting where to Next? Available: www.pwc.co.za/en/assets/pdf/integrated-reporting-survey-2015.pdf [Accessed 16 February 2016].
- Raemaekers, K., Maroun, W. & Padia, N., (2016). Risk Disclosures by South African Listed Companies Post-King III. *South African Journal of Accounting Research*, No. 30 Vol. (1), pp. 1–60.
- Solomon, J., (2010). *Corporate Governance and Accountability*, 3rd ed. Bognor Regis, UK: John Wiley and Sons.
- Solomon, J. & Maroun, W., (2012). *Integrated Reporting: The New Face of Social, Ethical and Environmental Reporting in South Africa?* London: The Association of Chartered Certified Accountants (ACCA). Available: www.researchgate.net/publication/236586863.
- Stent, W. & Dowler, T., (2015). Early Assessments of the Gap between Integrated Reporting and Current Corporate Reporting. *Meditari Accountancy Research*, No. 23 Vol. (1), pp. 92–117.
- Stubbs, W. & Higgins, C., (2014). Integrated Reporting and Internal Mechanisms of Change. *Accounting, Auditing & Accountability Journal*, No. 27 Vol. (7), pp. 1068–1089.
- Summerhays, K. & De Villiers, C., (2012). Oil Company Annual Report Disclosure Responses to the 2010 Gulf of Mexico Oil Spill. *Journal of the Asia-Pacific Centre for Environmental Accountability*, No. 18 Vol. (2), pp. 103–130.
- Thomson, I., (2015). 'But Does Sustainability Need Capitalism or an Integrated Report? A Commentary on 'The International Integrated Reporting Council: A story of Failure' by Flower, J. *Critical Perspectives on Accounting*, No. 27, pp. 18–22.
- Thomson, I. & Bebbington, J., (2005). Social and Environmental Reporting in the UK: A Pedagogic Evaluation. *Critical Perspectives on Accounting*, No. 16 Vol. (5), pp. 507–533.
- Tregidga, H., Milne, M. & Kearins, K., (2014). (Re)presenting 'Sustainable Organizations'. *Accounting, Organizations and Society*, No. 39 Vol. (6), pp. 477–494.
- Watts, R. L. & Zimmerman, J. L., (1976). *Positive Accounting Theory*. Upper Saddle River, NJ: Prentice-Hall.
- Watts, R. L. & Zimmerman, J. L., (1978). Towards a positive theory of the determination of accounting standards. *The Accounting Review*, No. 53 Vol. (1), pp. 112–134.

RANCANGAN BIAYA PENELITIAN

Judul : **Praktik Akuntansi Keberlanjutan dalam Ketidakpastian Usaha dan Ketidakpastian Lingkungan Setelah 2022**

Tahun : **Genap 2021 - 2022**

Nama Pengusul: Rene Johannes

Rekapitulasi Biaya

No.	URAIAN/RINCIAN	BIAYA
1	Biaya Operasional (Survei/Pengolahan Data)	12,076,000.00
2	Biaya Bahan Habis Pakai	2,350,000.00
3	Biaya Seminar di UB	4,400,000.00
4	Biaya ATK dan Laporan	1,000,000.00
5	Honor Peneliti	-
Jumlah Biaya		19,826,000.00

Biaya Operasional

No.	Pelaksanaan Kegiatan	Jml Personel	Jml Jam/mg	Upah (Rp)	Jml Bulan	Total Biaya
1	Pengumpulan Data (Wawancara, dsb.)	3	6	175,000	3	9,450,000
2	Pengolahan Data	2	6	200,000	1	2,400,000
3	Penunjang Operasional					226,000
Jumlah						12,076,000

Biaya Bahan Habis Pakai

No.	URAIAN/RINCIAN	Volume	Biaya/unit (Rp)	Biaya (Rp)
1	Fotokopi dokumen	500	200.00	100,000.00
2	Cenderamata	15	150,000.00	2,250,000.00
Jumlah				2,350,000.00

Biaya Alat Tulis Kantor

No.	URAIAN/RINCIAN	Volume	Biaya/unit (Rp)	Biaya (Rp)
1	ATK	1	400,000.00	400,000.00
2	Pembuatan Laporan	3	200,000.00	600,000.00
Jumlah				1,000,000.00